

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam meningkatkan pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan penggajian. Temuan-temuan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo telah berfungsi dengan cukup baik dalam mendukung pengelolaan data gaji pegawai. Namun, penggunaan sistem yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh proses penggajian, mulai dari pembuatan daftar gaji hingga pembayaran. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal kecepatan pemrosesan data dan ketepatan informasi yang dihasilkan serta servernya yang lambat sehingga berdampak pada efisiensi operasional.

2. Proses Penggajian

Proses penggajian yang diterapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo masih mengandalkan bendahara pengeluaran yang merangkap tugas dalam pembuatan dan pengelolaan daftar gaji. Hal ini mengakibatkan rentannya kesalahan dan ketidaktepatan dalam perhitungan gaji, serta memperbesar kemungkinan terjadinya fraud atau penyalahgunaan wewenang. Idealnya, pembuatan dan pengelolaan daftar gaji harus melibatkan lebih dari satu pihak untuk meminimalisir risiko kesalahan dan meningkatkan transparansi.

3. Aspek Pengendalian Internal

Pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pembagian tugas yang jelas antara pihak yang bertanggung jawab dalam proses penggajian. Dengan adanya rangkap tugas oleh bendahara pengeluaran, kontrol internal yang lemah dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penggajian, baik berupa kesalahan perhitungan maupun penyalahgunaan wewenang. Pembagian tugas yang lebih jelas dan independen antara pengelolaan penggajian dan pengeluaran sangat penting dalam memperkuat pengendalian internal di instansi ini.

4. Efektivitas Sistem Penggajian

Secara keseluruhan, sistem penggajian yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya efektif. Ketidakpastian yang muncul dari rangkap tugas bendahara pengeluaran menurunkan efektivitas pengelolaan gaji, karena ketidakjelasan dalam pengawasan dan proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem penggajian, disarankan agar instansi ini memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dan melakukan pemisahan tugas yang lebih tegas antara pihak yang mengelola pengeluaran dan pihak yang mengelola penggajian.

Dengan rekomendasi pemisahan tugas, peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem informasi akuntansi, serta penguatan aspek pengendalian internal, diharapkan sistem penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan terhindar dari potensi kesalahan atau penyalahgunaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian pada instansi pemerintah di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, dengan fokus pada permasalahan rangkap tugas oleh bendahara pengeluaran yang membuat dan mengelola daftar gaji. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang perlu dipertimbangkan agar hasil yang diperoleh tidak digeneralisasi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang terbatas. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Waktu Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait tidak dapat dilakukan secara mendalam. Terbatasnya waktu penelitian mengakibatkan terbatasnya jumlah responden yang dapat diwawancarai, serta terbatasnya jumlah dokumen yang dapat dianalisis. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan dinamika yang terjadi di instansi terkait.

2. Keterbatasan Akses terhadap Data dan Dokumentasi

Meskipun penelitian ini berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen yang relevan, terdapat keterbatasan dalam akses terhadap beberapa dokumen dan informasi terkait pengelolaan penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Beberapa data yang bersifat sensitif dan terkait dengan kebijakan internal mungkin tidak dapat diakses secara penuh, sehingga membatasi kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang berarti bagi perbaikan sistem informasi akuntansi penggajian di instansi pemerintah, terutama dalam meningkatkan pengendalian internal.

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan yang ada memberikan kesempatan untuk penelitian lanjutan yang dapat mengatasi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

C. Saran

1. Bagi Akademis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan penggajian di instansi pemerintah. Namun, ada beberapa area yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan memperdalam topik penelitian ini:

a) Pengembangan Penelitian Lanjutan

Penelitian ini hanya terfokus pada satu instansi pemerintah, yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai instansi pemerintah lainnya untuk mengetahui sejauh mana masalah rangkap tugas oleh bendahara pengeluaran juga terjadi dan mempengaruhi sistem penggajian dan pengendalian internal. Penelitian komparatif antar instansi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini dan membantu merumuskan rekomendasi yang lebih luas.

b) Analisis Pengaruh Rangkap Tugas terhadap Efektivitas

Pengendalian Internal

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemisahan tugas dalam pengelolaan penggajian dan pengeluaran untuk meningkatkan pengendalian internal. Saran untuk penelitian akademis

selanjutnya adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak rangkap tugas terhadap efektivitas pengendalian internal dan keuangan pemerintah. Penelitian ini dapat mencakup analisis kuantitatif untuk mengukur sejauh mana rangkap tugas mempengaruhi terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi Pihak Instansi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pengendalian internal, khususnya mengenai rangkap tugas oleh bendahara yang membuat dan mengelola daftar gaji. Adapun saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a) Pemisahan Tugas dan Fungsi dalam Penggajian

Salah satu rekomendasi utama adalah pemisahan tugas antara bendahara yang membuat daftar gaji dan bendahara yang mengelola serta melakukan verifikasi pembayaran gaji. Pemisahan tugas ini akan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, atau fraud. Dengan adanya pemisahan fungsi, pengawasan internal akan lebih terjamin, serta meningkatkan transparansi dalam proses penggajian.

b) Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi

Sistem informasi akuntansi yang ada saat ini perlu ditingkatkan untuk dapat mengintegrasikan seluruh proses penggajian, mulai dari pembuatan daftar gaji hingga pembayaran. Penggunaan sistem yang lebih terintegrasi akan mengurangi ketergantungan

pada proses manual dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan gaji serta meningkatkan efisiensi operasional. Disarankan untuk mengevaluasi dan meng-upgrade sistem yang ada, atau bahkan mengimplementasikan sistem yang berbasis ERP (Enterprise Resource Planning) yang dapat menghubungkan seluruh proses secara otomatis.

c) Peningkatan Pengendalian Internal melalui Audit Rutin

Untuk memperkuat pengendalian internal, pihak instansi harus melakukan audit secara rutin terhadap sistem penggajian. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang. Audit ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang masih memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki. Melibatkan auditor internal yang independen dalam proses ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggajian.

d) Penyediaan Pelatihan bagi Pegawai Terkait Pengelolaan Penggajian

Sebagai langkah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pihak instansi perlu memberikan pelatihan berkala terkait sistem informasi akuntansi dan pengelolaan penggajian. Pelatihan ini bertujuan memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam proses penggajian memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur yang benar, serta penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal.

e) Peningkatan Pengawasan dan Pembagian Wewenang yang Jelas

Pihak instansi harus memperjelas pembagian wewenang dalam setiap tahapan penggajian. Hal ini termasuk penugasan tugas yang jelas antara pihak yang mengelola gaji, bendahara, dan

pihak terkait lainnya. Adanya pembagian tugas yang lebih transparan akan mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam proses penggajian. Pembagian wewenang yang jelas juga akan membantu memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas.

f) Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan Penggajian

Disarankan bagi instansi untuk melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan penggajian yang berlaku. Kebijakan yang ada harus mencerminkan standar pengelolaan keuangan yang baik dan memadai, serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang diterapkan. Pembaruan kebijakan ini juga dapat mencakup penyesuaian dengan peraturan terbaru yang relevan dengan pengelolaan penggajian di instansi pemerintah.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, serta mengurangi risiko kesalahan administratif, kecurangan, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam sistem penggajian. Demikian saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini. Diharapkan saran-saran tersebut dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan sistem informasi akuntansi penggajian di instansi pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dan dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian internal serta tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.